

Lurah dan Camat Diminta Selektif Data Vaksinasi Pelaku UKM

TANGERANG (IM)- Lurah dan Camat di Kota Tangerang diminta agar lebih selektif dalam proses pendaftaran calon penerima vaksinasi Covid-19 bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan pedagang kaki lima (UMKM dan PKL) agar tepat sasaran.

"Minimal lokasi usahanya ada di Kota Tangerang, kalau KTP luar kota tidak apa-apa. Ditekankan bahwa prioritas vaksin kali ini bagi pedagang dan pelaku UMKM," kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah, Rabu (26/5).

Selain itu, Arief juga meminta agar Camat dan Lurah lebih gencar menyosialisasikan kepada masyarakat khususnya pedagang agar bersedia mengikuti program vaksinasi. "Tadi masih ada beberapa pedagang yang belum ikut vaksinasi," ujar dia.

Arief menuturkan vaksinasi Covid-19 bagi pelaku UMKM merupakan upaya pemulihan ekonomi untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi secara langsung.

Sementara Wakil Wali Kota Sachrudin meminta kepada para pelaku UMKM dan PKL yang

ikut kegiatan ini untuk tidak ragu dalam mengikuti vaksinasi Covid-19. "Karena ini salah satu upaya Pemkot Tangerang untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," katanya.

Perlu diketahui Pemerintah Kota Tangerang Banten menyiapkan kuota vaksinasi Covid-19 untuk 20 ribu pelaku UMKM hingga Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di 13 Kecamatan.

Program vaksinasi lanjutan bagi pelaku UMKM dan juga PKL akan mulai dilakukan pada Selasa (25/5) dengan sasaran utama para pedagang yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Program vaksinasi yang ditujukan bagi pelaku UMKM dan pedagang ini bertujuan mendukung program pemerintah pusat dalam proses penguatan ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyebutkan hingga tanggal 18 Mei 2021 sudah memberikan vaksinasi Covid-19 kepada 110.062 penerima untuk dosis pertama atau sebesar 49,40 persen dan 88.019 penerima atau 39,51 persen untuk dosis kedua dari target 222.765 sasaran. ● pp

Tarif Parkir Situ Cipondoh Rp25.000, Ketua DPRD Minta Camat Kroscek

TANGERANG (IM)- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo menanggapi beredarnya foto tarif parkir senilai Rp25.000 di Taman Wisata Danau Situ Cipondoh beberapa waktu lalu, Rabu (26/5).

Saat ditemui di ruang kerjanya, Gatot Wibowo langsung menghubungi via telepon Camat Cipondoh, Rizal Ridoloh untuk segera melakukan kroscek dan cek lokasi terkait SKU yang diterbitkan oleh Ekbang.

"Ekbang mana nih maksudnya? Setahu saya Ekbang itu Ekonomi dan Bangunan yang selalu digunakan pada instansi kelurahan, kecamatan, kota dengan jabatan tertentu di pemerintahan," ujar Gatot.

Gatot meminta Camat Cipondoh untuk melakukan kroscek, terkait SKU Ekbang yang diterbitkan, kira-kira dari mana hingga terbitnya SKU atas Ekbang.

"Tolong, Pak Camat untuk kroscek ke lokasi, terkait terbitnya SKU No.500/343-EKBANG/VII/2004, kira-kira dari instansi mana," imbuhnya.

Gatot berharap konfirmasi langsung ke Camat Cipondoh ini dilakukan agar persoalan ini menemukan titik terang.

"Setahu saya Situ Danau Cipondoh itu, wewenang dan otoritas Provinsi Banten. Untuk pemerintah daerah (Kota Tangerang) tidak memungut sepeser pun apalagi masuk ke kas daerah termasuk lapak pedagangnya," katanya.

Mungkin bisa saja ada kelompok masyarakat yang mengelola untuk perawatan atau pemeliharaan lokasi Situ Danau Cipondoh. Jadi pemerintah Kota Tangerang jelas tidak mengeluarkan retribusi parkir Danau Situ Cipondoh.

"Walaupun ada retribusi parkir lumayan kan buat kas daerah," pungkas Gatot. ● pp



IDN/ANTARA

KASUS KLB COVID-19 DI PERUMAHAN KOTA BOGOR

Warga disemprot disinfektan saat keluar dari Perumahan Griya Melati, Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/5). Pemerintah Kota Bogor menetapkan kasus COVID-19 di perumahan tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah bertambahnya jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 menjadi 60-an orang.

BPBD Banten Butuh Sembilan Sirene Peringatkan Tsunami

Pemerintah Provinsi Banten sudah memasang alat EWS itu di tiga titik pesisir yakni Pantai Pasauran, Labuan dan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Pemasangan sirene itu sangat penting untuk mengurangi risiko kebencanaan, karena menyampaikan peringatan bunyi suara keras hingga berlangsung lima menit dan bisa terdengar sampai tiga kilometer dari pesisir pantai.

LEBAK (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten membutuhkan sembilan sirene untuk memperingatkan bencana tsunami kepada masyarakat

kat pesisir guna mengurangi risiko kebencanaan.

"Alat sirene sebagai tanda alarm peringatan tsunami atau Early Warning System (EWS) itu sangat bermanfaat karena

ada waktu 30 menit setelah bunyi keras, warga bisa menyelamatkan diri ke lokasi yang aman," kata Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Provinsi Banten Sumardi di Lebak, Selasa (25/5) kemarin.

Pemerintah Provinsi Banten yang sudah memasang alat EWS itu di tiga titik pesisir yakni Pantai Pasauran, Labuan dan Panimbang Kabupaten Pandeglang.

Pemasangan sirene itu tentu sangat penting untuk mengurangi risiko kebencanaan, karena menyampaikan peringatan bunyi suara keras hingga berlangsung lima menit dan bisa terdengar sampai tiga kilometer dari pesisir pantai.

Selama bunyi sirene itu, kata dia, masyarakat pesisir bisa menyelamatkan diri ke lokasi-lokasi jalur evakuasi

guna menghindari korban bencana tsunami.

Penyelamatan itu bisa dilakukan selama 30 menit setelah terjadinya gempa tektonik dari sebelum terjadi gelombang tsunami.

"Kami berharap tahun ini bisa terpasang sembilan alat EWS tsunami antara lain pesisir Pantai Sawarna, Bayah, Panggaran, Cihara, Pagelaran, Sukamanah Wanaralam, Binauangeun dan Sumur," katanya menjelaskan.

Selama ini, kata dia, wilayah pesisir pantai Provinsi Banten merupakan daerah potensi bencana tsunami, karena adanya patahan utara atas sesar di Perairan Samudera Hindia dengan Benua Indo-Australia juga di bagian selatan terdapat Lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng

Pasifik di bagian timur.

Karena itu, masyarakat pesisir agar meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam tersebut, terlebih saat ini di pesisir selatan Banten terjadi peningkatan gempa tektonik.

Bahkan, kata dia, sepanjang Minggu (23/5) terjadi sebanyak 35 kali kegempaan di pesisir pantai Banten, namun tidak menimbulkan kerusakan infrastruktur juga korban jiwa.

Pada prinsipnya, kawasan pesisir pantai Banten sebagai daerah rawan bencana tsunami, sehingga masyarakat tetap harus selalu waspada guna mengurangi risiko kebencanaan.

"Kami telah menyebarkan surat peringatan kewaspadaan bencana alam kepada warga pesisir itu," katanya. ● pra

BPBD Banten Imbau Wisatawan Tidak Berenang di Pantai Selatan

LEBAK (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mengimbau wisatawan untuk tidak berenang di kawasan pesisir pantai selatan Lebak, karena tinggi gelombang berpotensi mencapai 2,5 hingga 4,0 meter. "Kami memperingatkan gelombang tinggi itu bisa menimbulkan kecelakaan laut," kata Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Provinsi Banten, Sumardi di Lebak, Rabu (26/5).

Berdasarkan laporan dari BMKG Banten, selama beberapa hari ke depan cuaca di pesisir pantai selatan memburuk dengan ketinggian gelombang berpeluang mencapai 2,5 sampai 4,0 meter dan kecepatan angin 15 knot atau 30 kilometer per jam. Tujuan angin bergerak dari tenggara dengan jarak pandang antara empat sampai enam kilometer. Kondisi itu sangat berbahaya jika berenang di sekitar pantai selatan. "Kami minta wisatawan dapat mematuhi peringatan dan imbauan ini guna mencegah kecelakaan laut," katanya.

Ia mengatakan para pengunjung pesisir selatan Lebak agar tidak melakukan aktivitas di sekitar pantai, terlebih berenang. Saat ini, kata dia, cuaca buruk melanda pesisir selatan, mulai Pantai Binauangeun, Bagadur, Sukahujan, Panggarangan, Bayah,

Pulau Manuk, dan Sawarna.

Oleh karena itu, BPBD Banten menyampaikan surat peringatan cuaca buruk pada Polsek, Kesyahbandaran, TPI, petugas pengamanan pantai, pemilik hotel, dan nelayan. Begitu juga wisatawan agar tidak berenang guna mengantisipasi kecelakaan laut, apalagi seorang pelajar yang terseret ombak di kawasan wisata Pantai Sawarna, Selasa (25/5) hingga kini belum ditemukan, sudah diingatkan agar tidak berenang di sekitar pantai.

Mereka itu, tiga pelajar SMPN Cilograng Kabupaten Lebak. Awalnya bermain di tepi pantai, kemudian berenang hingga menjadi korban kecelakaan laut. "Kami minta surat imbauan itu dapat dipatuhi dengan tidak berenang di sekitar pantai selatan," ujarnya.

Ia menjelaskan cuaca pesisir pantai selatan yang berhadapan langsung dengan perairan Samudera Hindia memiliki karakter berbeda dengan pantai di Banten bagian utara. Gelombang karakter pantai selatan cukup tinggi dan banyak karang, sehingga berbahaya bagi wisatawan yang berenang di sekitar pantai itu. "Kami berharap wisatawan dapat mematuhi peringatan ini guna mencegah kecelakaan laut," tuturnya. ● pra

Tempat Wisata di Lebak Dibuka Kembali

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten Lebak kembali membuka tempat wisata yang sempat ditutup karena adanya kebijakan Gubernur Banten, terkait pengendalian pandemi Covid-19. "Kebijakan penutupan itu, namun akhirnya kini Wahidin Halim kembali membuka lokasi wisata di Banten khususnya di zona kuning," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, Imam Rahmayadin di Lebak, kemarin.

Selama ini, Kabupaten Lebak masuk zona kuning dengan tingkat penyebaran Covid-19 cukup rendah, sehingga dibuka kembali tempat wisata tersebut. Pembukaan lokasi wisata tetap wisatawan harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan guna mencegah pandemi Covid-19 berlanjut.

Selain itu, pengelola wisata wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh hingga menyediakan sarana sanitiser untuk mencuci tangan juga dilarang terjadi kerumunan. Apabila pengelola wisata melakukan pelanggaran maka bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5 juta. "Kami ketat menerapkan protokol kesehatan, meskipun destinasi lokasi wisata dibuka kembali," katanya menjelaskan.

Lokasi wisata di Kabupaten Lebak bisa dikunjungi wisatawan untuk menikmati panorama alam, di antaranya destinasi wisata pesisir pantai dan wisata budaya masyarakat Baduy. Selain itu juga pengunjung dapat menikmati panorama alam dengan tempat wisata di Atas Awan Gunung Luhu dan wisata religius.

Pembukaan kawasan destinasi wisata, kata dia, diharapkan dapat memulihkan perekonomian masyarakat setempat juga mampu meningkatkan daya beli warga. "Kami yakin perguliran ekonomi cukup besar jika lokasi wisata itu dibuka," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Asp Komar seorang pengelola wisata buatan mengatakan pihaknya merasa lega setelah pemerintah kembali membuka destinasi wisata, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

Sebab, banyak warga di sini mengais rejeki dari wisatawan dengan menjual aneka makanan. "Kita menjamin pengunjung yang datang ke tempat wisata sini aman dan tidak terpapar Covid-19, sehingga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun," kata Asp. ● pra

Terkait Acara Bukber Kadis PUPR, BKD Tunggu Hasil Pemeriksaan Inspektorat

SERANG (IM) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten terkesan enggan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Protokol Covid-19 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, M. Trenggono. BKD lebih memilih bersikap pasif, dengan menunggu tindakan dari Inspektorat Banten.

Hal ini disampaikan Komarudin, Kepala BKD Banten, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Kata dia, pihaknya baru dapat menjatuhkan sanksi, setelah yang bersangkutan, dalam hal ini Trenggono, diputuskan bersalah oleh Inspektorat.

"Kita tunggu hasil pemeriksaan Inspektorat dulu, dari hasil pemeriksaan itu baru nanti kita putuskan apa sanksinya," kata Komarudin.

Ia menyarankan, sebaiknya permasalahan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Sebab, kata Komarudin, bulan puasa, waktu terjadinya dugaan pelanggaran, telah berlalu. "Cari berita yang lain aja deh, kan puasannya udah lewat," kata dia.

Lagi pula, kata dia lagi, Surat Edaran (SE) yang menjadi acuan permasalahan tersebut, dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kata dia, SE tersebut kurang tepat bila dikenakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). "Kalau buat kita (ASN-Red) lebih tepat mengacu pada Menpan-RB," jelasnya.

Selain itu, tambah Komarudin, SE tidak itu sendiri tidak mencantumkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Jadi kata dia, surat tersebut lebih

bersifat himbauan, ketimbang perintah.

"Itu lebih bersifat himbauan bukan perintah. Di surat tersebut juga tidak mencantumkan sanksi untuk pelanggarannya," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Iwan Hermawan, Ketua LSM Kajian Realitas (Karat) mengukuhkan sikap dari Kepala BKD Banten, Komarudin. Kata dia, sebagai pimpinan yang instansi yang menangani masalah kepegawaian, Komarudin tidak boleh mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sekecil apapun.

"Saya melihat adanya keberpihakan atau ketidakadilan, atas sikap yang ditunjukkan yang ditunjukkan oleh Kepala BKD terkait permasalahan ini," ucapnya yang akrab disapa Adung ini.

Menurutnya, Komarudin tidak layak mengeluarkan pernyataan yang menyuruh wartawan untuk mencari berita yang lain. Sebab, tambahnya, wartawan berhak untuk menentukan apa yang menurutnya layak untuk diberitakan atau tidak.

"Itu jelas diatur dalam Undang-Undang Pers, bahwa wartawan bebas menyiarkan sebuah berita, selama tidak mengandung unsur SARA," ucap Adung.

Sikap tersebut, kata Adung, jelas menunjukkan keengganan dari BKD untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala DPUPR Banten. Kata Adung, Kepala BKD terkesan memihak pada Kepala Kepala DPUPR, ketimbang pada rasa keadilan masyarakat atau PNS lain, yang pernah dihukum karena melakukan pelanggaran yang

sama, dalam hal ini pelanggaran Protokol Covid-19. "Sepanjang tahun kemarin dan awal tahun ini, sudah puluhan ASN yang diberi sanksi oleh BKD karena melanggar protokol Covid. Tapi kenapa ini seolah tidak berlaku pada kepala DPUPR," ujarnya.

Lebih lanjut Adung, juga menyayangkan pernyataan Komarudin, yang mengatakan SE Mendagri tersebut tidak tepat bila dikenakan kepada ASN. Menurutnya, itu jelas merupakan sebuah upaya pembohongan publik, karena jelas dalam SE tersebut Kepala Daerah diminta untuk memerintahkan ASN agar tidak melakukan Bukber ataupun hal bihalal pada Ramadhan tahun ini.

"Atau memang, jangan-jangan Gubernur tidak menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, sehingga para bawahannya dengan sekenanya mengabaikan Edaran dari Mendagri ini," paparnya.

Adung juga mempertanyakan maksud dari pernyataan Komarudin yang mengatakan bahwa SE Mendagri ini tidak mengakibatkan sanksi apapun atas pelanggaran yang terjadi.

Dijelaskan Adung, semua Surat Edaran dimanapun memang tidak mencantumkan hukuman atau sanksi, namun pelanggaran atas surat edaran secara otomatis dikenai sanksi hukum yang mendasari dikeluarkannya surat edaran tersebut.

"Ini maksudnya membodohi masyarakat atau memang Komarudinnya yang tidak mengerti. Dasar dari SE Mendagri ini adalah Penanganan Covid, yang diatur dalam sejumlah Undang-undang dan Keppres, jadi jelas ada hukumnya," tandas Adung. ● pay



IDN/ANTARA

DANAU YANG TERBENTUK KARENA SIKLON SEROJA JADI LAHAN PERTANIAN

Petani beraktivitas di lahan yang sempat menjadi danau baru akibat siklon Seroja pada awal April 2021 lalu di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, NTT, Rabu (26/5). Lahan seluas dua hektare yang sempat terbentuk karena Siklon Seroja itu kini sudah mengering dan saat ini dijadikan sebagai lahan bertani bagi warga sekitar.



IDN/ANTARA

EDUKASI PROKES MELALUI DONGENG

Pendongeng Harris Rizki dan bonekanya si Ayis menghibur anak-anak di kompleks TPU Rangkah, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/5). Kegiatan mendongeng tersebut selain untuk menghibur anak-anak juga sekaligus mengedukasi tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan guna memutus penyebaran COVID-19.

Puluhan Warga Perumahan di Parung Panjang Terpapar Covid-19

BOGOR (IM)- Sebanyak 21 warga di Blok 17, Jalan Nanas Perum II Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, pasca 21 orang dilaporkan terpapar Covid-19. Oleh karena itu, Satgas Covid-19 Kecamatan Parung Panjang berencana melakukan PCR test terhadap 131 warga di wilayah tersebut.

Camat Parung Panjang, Icang Aliudin menuturkan, saat ini total warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 21 orang. Dimana satu orang di antaranya masih dalam perawatan di rumah sakit. "Satu orang masih dalam perawatan di rumah sakit. 20 warga lainnya dilanjutkan untuk dilakukan swab tes dan hasilnya Jumat besok," kata Icang melalui telepon selularnya, Rabu.

Dia menuturkan, dari puluhan warga yang terkonfirmasi positif, Satgas sudah melakukan penelusuran satu blok berjumlah 131 orang," jelas Icang yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kecamatan Parung Panjang.

Icang pun memastikan, blok 17 di Perum II Parung Panjang saat ini berstatus zona merah dan dilakukan karantina wilayah secara mikro. Setiap aktivitas warga mulai dibatasi dan keluar-masuk warga pun diidentifikasi. "Kami lakukan karantina mikro, untuk meminimalisasi penularan virus ke blok-blok lain atau menyebar ke seluruh perumahan yang warganya hampir 300 kepala

keluarga," katanya.

Di samping itu, sambung Icang, pihaknya berencana memindahkan pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 ke pusat isolasi milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, yakni di Rumah Isolasi di Kemang.

Namun, menurutnya, beberapa warga merasa keberatan untuk meninggalkan rumah. Sebab, di rumah warga yang bersangkutan ada keluarga yang bisa mengurus dan mempunyai ruang khusus isolasi. "Sebetulnya, rumah isolasi di Kemang telah kami siapkan. Hanya saja, para warga menolak dengan alasan di rumah mereka mempunyai ruang yang bisa digunakan isolasi mandiri dan enggan tinggal sendiri," jelas Icang.

Guna melakukan pengawasan secara ketat, sejumlah personel Satgas dan Forkompinda Kecamatan Parung Panjang pun disisipkan. Khususnya bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah. "Segala kebutuhan warga yang isoman kami penuhi, mulai dari bahan makanan hingga obat-obatan," ucap Icang.

Sebelumnya, diketahui puluhan warga dalam satu perumahan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor positif Covid-19 dari hasil tes antigen. Diduga, mereka terpapar saat kegiatan silaturahmi Idul Fitri.

Tim Satgas Covid-19 Parung Panjang bersama Puskesmas setempat melakukan tracing dan didapati 43 orang kontak erat untuk menjalani tes antigen pada 23 Mei 2021. Dari hasil tes tersebut, didapati lima orang positif Covid-19.

"Dari 38 yang negatif, 8 orang sebagai suspek karena mengalami gejala klinis covid-19 dan didaftarkan swab PCR. Jadi total kasus menjadi 20 orang positif dari swab antigen melakukan isolasi mandiri dan 1 orang positif PCR dirawat di rumah sakit," pungkasnya. ● gio